

POLA REKRUTMEN CALON DPRD PARTAI POLITIK PERSATUAN INDONESIA (PERINDO) DALAM PEMILIHAN UMUM 2019 DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Paula Yunita Berek¹, Medan Yonathan Mael²
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Timor

ABSTRAK

Partai politik sering kali melahirkan politisi yang cenderung berorientasi uang, kuatnya dominasi elit partai, faktor kekeluargaan, nepotisme, dan kedekatan politik, serta popularitas yang dimiliki calon merupakan jalan pintas yang banyak ditempuh, dimana jelang pendaftaran calon legislatif banyak partai politik yang melakukan manuver untuk merekrut berbagai macam kalangan untuk menjadi calon legislatif yang akan bertempur di pemilihan umum. Adanya Kecenderungan partai dalam melakukan rekrutmen kader dan anggota partai hanya menjelang pemilihan umum saja. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh partai Persatuan Indonesia (Perindo) di kabupaten Timor Tengah Utara. Hasil penelitian menunjukkan Sifat pola rekrutmen calon legislatif yang dilaksanakan Partai Perindo menggunakan sifat pola rekrutmen terbuka pada perencanaan atau pengumuman, persiapan, prosedur dan syarat rekrutmen, dalam merekrut calon legislatif dari eksternal partai, dan partai memberikan sosialisasi serta pembekalan terhadap calon legislatif berupa pemahaman tentang visi dan misi serta strategi kemenangan partai kepada para calon legislatif jelang Pemilu 2019. Proses rekrutmen yang digunakan partai Perindo bersifat tertutup, dikarenakan dalam merekrut calon legislatif hanya dengan cara ditunjuk dan dihubungi langsung oleh partai untuk maju sebagai calon legislatif. Metode rekrutmen calon legislatif yang digunakan Perindo belum sepenuhnya menggunakan metode ilmiah karena walaupun standar dan kriteria telah dipenuhi tetapi tidak melakukan perhitungan analisis yang matang. Kecenderungan yang lebih dominan digunakan Partai Perindo dalam merekrut yaitu kecenderungan *civil service reform* yaitu loyalitas dan kemampuan menggabungkan dua tipe kecenderungan antara tipe *partisan* dan tipe *compartmentalization*. Partai Perindo sendiri lebih mencari bakal calon legislatif yang memiliki loyalitas serta kemampuan di bidangnya masing-masing, dan lebih menekankan nilai serta komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Rekomendasi hasil penelitiannya adalah perlu secara maksimal melakukan sosialisasi, perlu menerapkan metode rekrutmen yang lebih revolusioner yang lebih memberi warna baru yang berbasis ilmiah dan terukur dengan inovasi-inovasi yang baru dan bersifat ilmiah.

Kata Kunci : Pola Rekrutmen, Calon Legislatif (DPRD), Pemilihan Umum, Partai Politik

PENDAHULUAN

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan Pola Rekrutmen Calon Legislatif Partai Politik Rersatuan Indonesia (PERINDO) Dalam Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Timor Tengah Utara, Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat dunia, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah negara. Pemilu memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat. Oleh karena itu, pemilu merupakan salah satu sarana legitimasi kekuasaan. Pemilu dapat dikatakan aspiratif dan demokratis apabila memenuhi beberapa persyaratan. *Pertama*, pemilu harus bersifat kompetitif, artinya peserta pemilu harus bebas dan otonom. *Kedua*, pemilu yang diselenggarakan secara berkala, artinya pemilu harus diselenggarakan secara teratur dengan jarak waktu yang jelas. *Ketiga*, pemilu harus inklusif, artinya semua kelompok masyarakat harus memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Tidak ada satu pun kelompok yang diperlakukan secara diskriminatif dalam proses pemilu. *Keempat*, pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana bebas, tidak di bawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas. *Kelima*, penyelenggara pemilu yang tidak memihak dan independen. (Huntington dalam Rizkiyansyah, 2007: 45).

Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945, dimaksudkan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan dapat menyerap serta memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan pemilu dikatakan berjalan

secara demokratis apabila setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dapat menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap pemilih hanya menggunakan hak pilihnya satu kali dan mempunyai nilai yang sama, yaitu satu suara. Hal ini yang sering disebut dengan prinsip *one person, one vote, one value* (*opovov*).

Pemilu yang bersifat langsung maksudnya rakyat sebagai pemilih (warga Negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih) berhak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Sedangkan pemilu yang bersifat umum mengandung makna terjaminnya kesempatan yang sama bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi. Pemilu yang bersifat bebas berarti bahwa setiap warga negara yang berhak memilih bebas untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya. Pemilu yang bersifat rahasia berarti bahwa dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas yang dilaksanakan secara lebih berkualitas, sistematis, *legitimate*, dan akuntabel dengan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama dan bebas dari kecurangan atau perlakuan yang tidak adil dari pihak mana pun. Pemilu harus dilaksanakan secara lebih berkualitas agar lebih menjamin kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Lemahnya pelembagaan partai politik di Indonesia, terutama disebabkan oleh belum munculnya pola partai kader. Partai politik cenderung

membangun partai massa dimana Partai politik hanya berorientasi pada perolehan dukungan suara di daerah pemilihannya dalam rangka memperoleh kekuasaan tanpa memperhatikan kepentingan dan pemenuhan hak konstituen yang memiliki ciri-ciri antarlain meningkatnya aktivitas hanya menjelang pemilu, menganut sistem keanggotaan yang amat longgar, belum memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta belum mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kefamenanu dalam melakukan rekrutmen calon anggota DPRD kabupaten Timor Tengah Utara pada pemilihan Umum tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.
Data calon DPRD kabupaten TTU partai
PERINDO
Pada pemilihan Umum DPRD Tahun 2019

No	Daerah Pemilihan	Calon DPRD Partai Perindo yang mendaftar	Calon DPRD Partai Perindo yang di tetapkan	Ket.
1	I	14	11	
2	II	8	7	
3	III	6	6	
4	IV	7	6	
Jumlah		35	30	

Sumber : Partai Perindo Kefamenanu 2019

Berdasarkan uraian di atas dimana DPRD kabupaten Timor Tengah Utara dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) sebanyak 30 orang calon DPRD dengan rincian antarlain daerah pemilihan I (Kecamatan Miomaffo Timur, Kecamatan Kota kefamenanu, Kecamatan Bikomi Selatan, Kecamatan Bikomi Tengah, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kecamatan Bikomi Utara dan kecamatan Naibenu) sebanyak 11 calon, daerah Pemilihan II (Kecamatan Insana, Kecamatan Insana Utara, Kecamatan Insana Fafinesu, Kecamatan

Insana Barat, Kecamatan Insana Tengah) sebanyak 7 calon; daerah pemilihan III (Kecamatan Biboki Selatan, Kecamatan Biboki Utara, Kecamatan Biboki Anleu, Kecamatan Biboki Tanpah, Kecamatan Biboki Moenleu dan Kecamatan Biboki Feotleu) sebanyak 6 Calon, Daerah Pemilihan IV (Kecamatan Miomaffo Barat, Kecamatan Noemuti, Kecamatan Noemuti Timur, Kecamatan Miomaffo Tengah, Kecamatan Musi, Kecamatan Mutis) sebanyak 6 Calon. Berdasarkan data tersebut maka peneliti akan membahas bagaimana penerapan pola rekrutmen politik yang diterapkan Partai Perindo Kabupaten Timor Tengah Utara untuk menjaring bakal calon anggota DPRD pada Pemilu DPRD tahun 2019. Selanjutnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Pola Rekrutmen Calon DPRD Partai Politik untuk Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Timor Tengah Utara (Studi pada Partai Persatuan Indonesia (Perindo))".

Adapun beberapa permasalahan penelitian yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- Terdapat banyak calon DPRD dari setiap daerah Pemilihan dan setiap Partai Politik sehingga menuntut setiap partai dan calon DPRD termasuk dari partai Persatuan Indonesia (Perindo) untuk bekerja meraih simpatik dan dukungan masyarakat.
- Partai dalam melakukan rekrutmen kader dan anggota partai hanya menjelang pemilihan umum saja
- Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh partai Persatuan Indonesia (Perindo) di kabupaten Timor Tengah Utara.

Mencermati latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- Bagaimana sifat, metode dan kecenderungan pola rekrutmen calon Anggota DPRD dari DPC Partai Perindo Kabupaten Timor Tengah Utara?
- Bagaimana pola rekrutmen untuk calon DPRD Partai Perindo?

Partai Politik

Partai politik (parpol) adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, dimana tujuannya untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan mereka (Budiarjo, 2008: 160).

Tipologi Partai Politik

Terdapat 2 (dua) tipologi partai politik yang hadir dalam kehidupan demokrasi. Tipologi tersebut adalah *berdasarkan kader* dan *berdasarkan massa* kedua tipologi ini hadir berdasarkan ideologi yang diwujudkan berdasarkan ide-ide perjuangan partai dan melalui program kerja partai yang ditawarkan oleh partai tersebut.

Tipologi partai berdasarkan struktur organisasinya terbagi menjadi tiga macam (Schroder dalam Surbakti, 1992:98) yaitu;

- a. Partai para Pemuka Masyarakat
Partai ini berupa gabungan yang tidak terlalu ketat, yang pada umumnya tidak dipimpin secara sentral ataupun profesional, dan yang pada kesempatan tertentu sebelum pemilihan anggota parlemen mendukung kandidat-kandidat tertentu untuk memperoleh suatu mandat.
- b. Partai Massa
Partai massa merupakan partai yang hadir dari kelas-kelas masyarakat yang sering termarginalkan dari elit yang berada diluar parlemen yang berkeinginan untuk merebut kekuasaan atau sekedar memperjuangkan kepentingan golongannya didalam pemerintahan. Sebagai jawaban terhadap tuntutan sosial dalam masyarakat industrial, maka dibentuklah partai-partai yang besar dengan banyak anggota, dengan tujuan utama mengumpulkan kekuatan yang cukup besar untuk dapat membuat terobosan, mempengaruhi pemerintah dan masyarakat, serta mempertahankan kekuasaan.

- c. Partai Kader
Partai kader merupakan partai yang lahir dengan dibentuk oleh beberapa orang yang memiliki intelektual diatas rata-rata sehingga melahirkan karakter partai yang eksklusif atau dominasi dari elit partai sangat kuat terutama dalam hal program dan elit partai ini sekaligus memperkuat program kerja partai dengan inovasi-inovasi baru yang hadir dari para elit partai. Partai ini muncul sebagai partai jenis baru, mereka dapat dikenali berdasarkan organisasinya yang ketat, karena mereka termasuk kader/kelompok orang terlatih yang personilnya terbatas, mereka berpegangan pada satu ideologi tertentu, dan terus menerus melakukan pembaharuan melalui sebuah pembersihan yang berkesinambungan.

Fungsi Partai Politik

Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Dalam negara demokratis, partai politik menyelenggarakan beberapa fungsinya (Budiarjo, 2008: 405), antara lain:

- a. Sarana komunikasi politik.
Parpol berfungsi menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Dalam masyarakat modern yang begitu luas, pendapat dan aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara di pandang pasir apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan "penggabungan kepentingan" (*interest aggregation*). Sesudah digabung, pendapat dan aspirasi ini diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang teratur yang dinamakan, "perumusan kepentingan" (*interest articulation*).
- b. Sarana Sosialisasi Politik (*Instrument of Political Socialization*). Sosialisasi

politik diartikan sebagai suatu proses dari seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik di dalam lingkungan masyarakat dimana ia berada. Biasanya proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Proses sosialisasi politik diselenggarakan melalui ceramah-ceramah penerangan, kursus-kursus kader, kursus penataran, dan sebagainya.

- c. Sarana Rekrutmen Politik. Dalam hal ini parpol berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*political recruitment*). Dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik. Juga disuahkan untuk menarik golongan muda untuk dididik untuk menjadi kader yang di masa mendatang akan mengganti pimpinan lama (*selection of leadership*).
- d. Sarana pengatur konflik. Di dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, parpol berusaha untuk mengatasinya.

Fungsi-fungsi dalam praktek politik diatas sering dilihat tidak mampu dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan, misalnya informasi yang diberikan partai politik kepada masyarakat justru menimbulkan kegelisahan dan perpecahan (Budiarjo, 2008: 416). Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan untuk mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu (Surbakti, 2010: 116).

Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Sebuah Negara bisa disebut

demokratis jika didalamnya terdapat mekanisme pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala atau periodik untuk melakukan sirkulasi elite (Huntington dalam Rizkiyansyah, 2007:3).

Pemilu merupakan sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar memancar ke bawah sebagai suatu kewibawaan yang sesuai dengan keinginan rakyat dan untuk rakyat (Karim dalam Dani, 2006:11).

Pemilihan Legislatif

Indonesia merupakan negara yang menjunjung demokrasi sehingga dalam menentukan pemerintah baik itu anggota legislatif ataupun Presiden akan lewat cara Pemilihan Umum dan Pemilihan Legislatif. Pemilihan legislatif adalah pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang nantinya akan bertugas menjadi anggota lembaga legislatif. Dalam memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memakai sistem *Single Non Transferable Vote*, dimana masing-masing pemilih hanya mempunyai satu suara.

Teori Rekrutmen Politik

Secara bahasa rekrutmen berasal dari bahasa inggris "recruit" yang berarti mendapatkan. Sedangkan rekrutmen berarti proses mencari atau mendapatkan anggota baru yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga yang bersifat politik ataupun non politik. Rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya (Surbakti, 2010: 118). Definisi rekrutmen politik pada

hakekatnya dapat diartikan sebagai penseleksian individu-individu yang berbakat untuk dapat menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan (Haryanto, 1982: 45).

Rekrutmen politik dalam partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (Budiarjo, 2008:164).

Sedangkan menurut Seligmen (1961:55) memberikan batasan sebagai berikut: rekrutmen adalah seleksi, pemilihan atau pengangkatan tokoh-tokoh yaitu suatu transformasi seleksi terhadap anggota masyarakat dari berbagai subkultur, kelas status, keagamaan dan atas dasar isme-isme kesukuan, dan kualifikasi tertentu yang kemudian memperkenankan mereka kepada peran-peran khusus.

Menurut Gaffar (1999:155), Rekrutmen Politik merupakan proses pengisian jabatan politik dalam sebuah negara, agar sistem politik dapat memfungsikan dirinya dengan sebaik-baiknya, guna memberikan pelayanan dan perlindungan masyarakat. Pamungkas (2011:91) mengartikan rekrutmen politik sebagai proses dimana individu dilibatkan dalam peran-peran politik aktif.

Proses Rekrutmen

Rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan politik dalam sebuah negara, agar sistem politik dapat memfungsikan dirinya dengan sebaik-baiknya. Guna memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Proses rekrutmen dilakukan secara terbuka dan secara tertutup.

Menurut Haris (2005:8), Perekrutan anggota legislatif oleh partai politik secara umum mencakup tiga tahap penting yakni mencakup:

1. Penjaringan calon, dimana dalam tahapan ini mencakup interaksi antara elite partai di tingkat desa atau kelurahan atau ranting partai dengan elite partai di tingkat atasnya atau anak cabang.
2. Penyaringan dan seleksi calon yang telah dijaring. Tahapan ini meliputi

interaksi antara elit tingkat anak cabang dan elite tingkat kabupaten/kota atau cabang/daerah.

3. Penetapan calon berikut nomor urutnya. Tahapan ini melibatkan interaksi antara elit tingkat cabang/daerah, terutama pengurus harian partai tingkat cabang/daerah dengan tim kecil yang dibentuk dan diberikan wewenang menetapkan calon legislatif.

Perlakuan partai politik terhadap keseluruhan tahap-tahap rekrutmen politik sangat berhubungan dengan pengorganisasian partai politik. Hal tersebut melahirkan pengelolaan partai terhadap pola rekrutmen partai politik. Biasanya cara partai melakukan tahapan-tahapan dari rekrutmen politik tersebut mempunyai pola yang berbeda-beda antara partai yang satu dengan partai yang lainnya.

Czudnowski (dalam Putra, 2007:103) mengemukakan model yang digunakan partai politik dalam rekrutmen politik antara lain :

1. Rekrutmen terbuka, yaitu syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. Dengan demikian cara ini sangat kompetitif. Jika dihubungkan dengan paham demokrasi, maka cara ini juga berfungsi sebagai sarana rakyat mengontrol legitimasi politik para elit.
2. Rekrutmen tertutup, yaitu berlawanan dengan cara rekrutmen terbuka. Dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan. Dengan demikian cara ini kurang kompetitif. Hal ini

menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit memperbaharui legitimasinya.

Berdasarkan dari pola yang dikemukakan tersebut, dapat disimpulkan partai politik biasanya menggunakan pola-pola tersebut untuk merekrut calon legislatifnya. Dalam pelaksanaan pola-pola tersebutpun biasanya partai politik juga mempunyai metode-metode tertentu dalam melakukan rekrutmen politiknya.

Cara rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik biasanya dikenal dengan dua metode (Hasibuan, 2006:52) yakni:

1. Metode ilmiah yakni rekrutmen yang dilakukan berdasarkan pada pedoman tertentu yang berisi tentang standar-standar tertentu.
2. Metode non ilmiah yakni rekrutmen yang dilakukan dengan tidak mengacu standar-standar tertentu, melainkan didasarkan pada perkiraan saja.

Adapun beberapa pola kecenderungan partai politik dalam melakukan rekrutmen politik terhadap calonnya (Romli, 2005:93) yakni sebagai berikut:

1. Partisan Pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis biasanya kader internal partai
2. Compartmentalization Proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang. misalnya aktivis LSM
3. Immediate Survival Proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang direkrut
4. Civil Service Reform Proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih tinggi atau penting contoh non-kader namun mempunyai kedekatan dengan partai.

Partai politik dapat menentukan sendiri proses rekrutmen mana yang

akan digunakan untuk melakukan proses rekrutmen. Proses yang dipilih partai politik menentukan karakteristik partai politik itu sendiri. Adapun dalam tahapan penetapan calon legislatif yang akan diusung oleh partai politik. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi (Haryanto, 1982:47) diantaranya adalah :

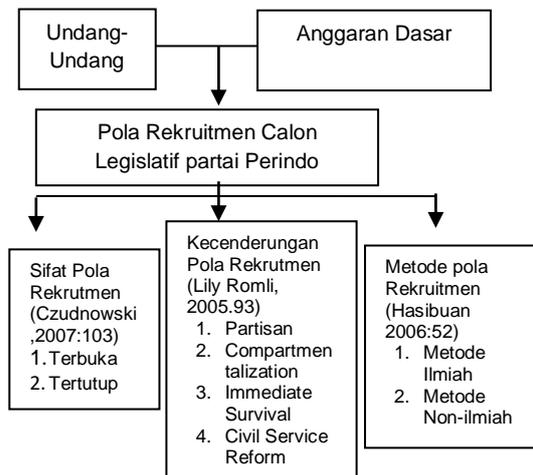
1. Pengalaman Organisasi Pengalaman ini baik selama ia mejadi anggota partai maupun sebelum menjadi anggota partai, karena ini merupakan hal yang mutlak diperlukan oleh seorang calon anggota parlemen dalam menjalankan roda organisasi nantinya.
2. Tingkat Pendidikan Ditingkat pendidikan baik formal maupun informal, tingkat pendidikan berkaitan erat dengan wawasan seseorang dalam menghadapi sesuatu masalah dan prilaku organisasi. Akan tetapi dalam AD/RT partai manapun tidak dicantumkan kriteria tingkat pendidikan sebagai persyaratan.
3. Pelatihan Kader atau Keterampilan Organisasi Dimana hal ini merupakan pelatihan untuk memberikan keterampilan dan kemampuan seorang calon anggota didalam mengelola organisasi nantinya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa di setiap sistem politik terdapat prosedur-prosedur untuk melaksanakan rekrutmen atau penyeleksian, akan tetapi walaupun prosedur-prosedur yang dilaksanakan oleh tiap-tiap sistem politik berbeda-beda satu dengan yang lainnya, namun terdapat suatu kecendrungan bahwa individu-individu yang berbakat yang dicalonkan untuk menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan mempunyai latar belakang yang hampir sama, yaitu bahwa mereka berasal dari kelas menengah atau kelas atas dan walaupun mereka berasal dari kelas bawah tetapi mereka merupakan orang-orang yang telah memperoleh pendidikan yang memadai.

Kerangka Pikir

Proses menyiapkan calon-calon yang diusung oleh partai politik, biasanya terdapat pola rekrutmen yang berbeda-beda dari partai politik tidak terkecuali juga yang dilakukan oleh Partai Perindo di kabupaten Timor Tengah Utara terlihat dari mekanisme yang dilakukan partai dalam melakukan tahapan rekrutmen awal hingga akhir. Bertitik tolak dari semua pemikiran di atas, maka untuk menyamakan persepsi terhadap permasalahan, akan digambarkan skema berpikir sebagai berikut:

Gambar 1 :
Skema pemikiran Penelitian



Sumber : Olahan Penulis tahun 2019

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek yang diteliti. Berdasarkan pengetahuan di atas, maka penelitian ini mendeskripsikan tentang Pola Rekrutmen Calon DPRD Partai Politik Persatuan Indonesia (PERINDO) pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Timor Tengah Utara, sehingga Informannya adalah pengurus DPC partai Perindo dan Bakal calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Timor Tengah

Utara sebanyak 15 Orang. Dalam penelitian deskriptif kualitatif, instrument utama dalam usaha mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan dilakukan melalui Koleksi data, reduksi data, kesimpulan dan verifikasi untuk mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi.

HASIL PENELITIAN

Pada proses menyiapkan calon-calon yang diusung oleh partai politik biasanya terdapat kecenderungan partai politik yang berbeda-beda dari masing-masing partai politik dalam menetapkan calon legislatifnya. Untuk menjawab kecenderungan yang digunakan tersebut, penulis menggunakan teori dari Romli (2005:93) yang mengemukakan bahwa pola kecenderungan partai politik dalam melakukan rekrutmen politik terhadap calonnya yakni : *Partisan*, Pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis biasanya kader internal partai; *Compartmentalization*, Proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang, misalnya aktivis LSM; *Immediate Survival*, Proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang direkrut; *Civil Service Reform*, Proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih tinggi atau penting contoh non-kader namun mempunyai kedekatan dengan partai.

Dalam perekrutan calon wakil rakyat untuk mengikuti pemilihan umum tentunya harus tepat memilih dan menggunakan metode rekrutmen politik. Hasibuan (2006:52) mengemukakan bahwa rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik biasanya dikenal dengan dua metode yakni : metode Ilmiah, yaitu rekrutmen yang dilakukan berdasarkan pada pedoman tertentu yang berisi tentang standar-standar tertentu; dan metode Non-ilmiah, yaitu rekrutmen yang

dilakukan dengan tidak mengacu standar-standar tertentu, melainkan didasarkan pada perkiraan saja. Penulis akan menganalisis metode yang digunakan oleh Partai Perindo Kabupaten Timor Tengah Utara dalam melaksanakan rekrutmen politik. Berkaitan dengan rekrutmen tersebut akan diketahui indikator penting terkait metode ilmiah atau non ilmiah yang digunakan oleh Partai Perindo. Indikator yang digunakan untuk menganalisis dan menilainya yakni ada tidaknya metode yang dijadikan bahan pedoman oleh Partai Perindo ada tidaknya sarana ilmiah yang dilakukan.

Sifat Rekrutmen

Perlakuan partai politik Perindo terhadap keseluruhan tahap-tahap rekrutmen politik sangat berhubungan dengan pengorganisasian partai politik. Hal tersebut melahirkan pengelolaan partai terhadap pola rekrutmen partai politik. Biasanya cara partai melakukan tahapan-tahapan dari rekrutmen politik tersebut mempunyai pola yang berbeda-beda antara partai yang satu dengan partai yang lainnya.

Rekrutmen terbuka

Rekrutmen terbuka dapat dipahami sebagai tahapan yang dilakukan oleh partai untuk memperoleh calon atau kader dimana syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. Dengan demikian cara ini sangat kompetitif. Jika dihubungkan dengan paham demokrasi, maka cara ini juga berfungsi sebagai sarana rakyat mengontrol legitimasi politik para elit.

Terkait tahapan rekrutmen yang telah dilakukan Partai Perindo Kabupaten Timor Tengah Utara, bahwa pada mekanisme rekrutmennya sudah dilakukan dari proses awal pendaftaran sampai dengan proses penilaian.

selesainya tahap kompetensi ini para Bacaleg akan dinilai sesuai dengan kriteria pokok yang ditetapkan untuk menilai calon mana yang berhak lolos, guna mendapatkan calon anggota legislatif yang benar-benar menguasai visi misi masing-masing, serta sejalan dengan program kemenangan partai. dalam proses seleksi Partai Perindo Kabupaten Timor Tengah Utara menjamin seluruh bakal calon anggota DPRD pada Pemilu 2019 yang diajukan kepada KPU memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau melakukan pelanggaran hukum, yang sudah ditanda tangani oleh ketua umum Partai Perindo.

Rekrutmen tertutup

Rekrutmen tertutup dapat dipahami sebagai tahapan yang dilakukan oleh partai untuk memperoleh calon atau kader dimana berlawanan dengan cara rekrutmen terbuka. Dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan. Dengan demikian cara ini kurang kompetitif. Hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit memperbaharui legitimasinya.

Partai Perindo juga mengadakan rekrutmen tertutup namun tetap berpedoman pada Pedoman atau TOR yang digunakan partai Perindo tentang petunjuk rekrutmen calon legislatif. Tahapan rekrutmen Bacaleg dari tahapan evaluasi administrasi, evaluasi kompetensi, evaluasi sosialisasi tetap diperhatikan. Tetapi rekrutmennya Bacaleg-nya lebih diutamakan pada anggota dan kader partai yang aktif.

Kecenderungan partai dalam rekrutmen politik

Suatu kriteria menjadi hal yang tak dapat dipisahkan bagi partai politik demi terciptanya individu-individu yang

berkualitas untuk ditempatkan pada jabatan politik ataupun organisasi. Kriteria dianggap menjadi suatu kewajiban demi mendapatkan individu yang terbaik. Pada sebuah proses rekrutmen biasanya partai politik memiliki kecenderungan yang berbeda dalam melakukan rekrutmennya, kecenderungan tersebut terkadang mengacu pada hasil dan proses yang ingin dicapai partai politik tersebut.

Berbicara pola kecenderungan rekrutmen politik, ada beberapa tipe kecenderungan rekrutmen politik, diantaranya *tipe partisan, compartmentalization, immediate survival, dan civil service reform*. Seperti halnya partai PERINDO, kecenderungan rekrutmen yang digunakan bisa dikatakan mencakup keempatnya, dimana secara garis besar dapat dikatakan lebih mengedepankan loyalitas, pendidikan, pengalaman organisasi, adanya otoritas pemimpin partai, dan kemampuan yang dimiliki oleh anggota calon legislatif.

Kecenderungan yang lebih dominan digunakan Partai PERINDO kabupaten Timor Tengah Utara dalam merekrut calon legislatif nya yaitu kecenderungan *civil service reform*, dimana untuk kecenderungan ini menggabungkan dua tipe kecenderungan antara *tipe partisan dan tipe compartmentalization*. kecenderungan *civil service reform* lebih menjurus kedua-duanya yaitu loyalitas dan kemampuan, dimana sangat mempengaruhi kinerjanya di DPRD dalam membawa misi kepartaiannya.

Partisan

Tipe kecenderungan partisan merupakan pendukung yang kuat, loyalitas tinggi, terhadap partai hingga bisa direkrut untuk jabatan strategis. Tipe ini lebih mengedepan kader-kader partai yang bisa direkrut untuk menjadi calon legislatif. Artinya pada kecenderungan ini, indikator yang dilihat adalah dari sisi loyalitas dan pendukung terutama yang berkaitan dengan kader-kader partai. Pada tipe kecenderungan ini menurut

penulis semua partai hampir dipastikan menggunakan tipe partisan.

Tipe partisan ini memang cenderung digunakan oleh Partai Perindo Kabupaten Timor Tengah Utara dalam melakukan rekrutmen Caleg. Dengan salah satu titik ukur kelayalitan, diharapkan dapat memperkuat penyampaian aspirasi dari pendukung partai dan menjalankan visi misi partai.

Compartmentalization

Partai politik di negara penganut sistem demokrasi seperti di Indonesia akan memberikan kesempatan besar bagi warga negaranya untuk berpartisipasi menjadi anggota partai politik dan juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk berkompetisi agar dapat terpilih menjadi orang yang dicalonkan sebagai pemimpin jabatan politik. Bagi warga negara yang mempunyai kemampuan yang menonjol, kemungkinan dirinya dapat terpilih sebagai calon legislatif ataupun pemimpin lebih besar.

Kemampuan yang menonjol yang dimaksud tentu saja tidak hanya berbicara segi kualitas semata. Tingkat pendidikan dan pengalaman organisasi juga menjadi pertimbangan partai politik dalam memilih dan menetapkan calon legislatifnya. Tingkat pendidikan dan pengalaman organisasi berkaitan erat dengan kemampuan wawasan seorang individu dalam menghadapi suatu masalah dan perilaku organisasi. Oleh karena itulah partai politik biasanya juga menggunakan tingkat pendidikan dan pengalaman organisasi dalam merekrut calon legislatifnya. Romli (2005:93) mengemukakan proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi ataupun kegiatan sosial politik seseorang (ketokohan) seperti contohnya aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang digunakan oleh partai politik dapat disebut kecenderungan *tipe compartmentalization*.

Partai Perindo Kabupaten Timor Tengah Utara memberikan perhatian terhadap tingkat pendidikan dan pengalaman organisasinya. Namun

Partai Perindo sendiri tidak memfokuskan hal tersebut, ini hanya menjadi penunjang kapasitas seorang calon ketika nantinya terpilih menjadi anggota dewan. Tipe kecenderungan *compartmentalization* ini juga digunakan oleh Partai Perindo Kabupaten Timor Tengah Utara dalam menentukan calon legislatifnya sebenarnya hanya menjadi nilai tambah saja tetapi menjadi poin penting bagi partai Perindo dalam menentukan kader yang akan dicalonkan jadi anggota legislatif.

Immediate Survival

Tipe kecenderungan immediate survival merupakan proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pimpinan partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang direkrut, yang artinya pada rekrutmennya dapat dikatakan wewenang pimpinan mempunyai porsi yang sangat besar. Pada porsi yang sangat besar itu sendiri tanpa memperhatikan profil dan kompetensi seorang calon legislatif. Hanya berdasarkan perkiraan pimpinan partai saja terkait siapa saja yang akan diusung menjadi calon legislatif.

Secara khusus memang jelas tidak terlihat bahwa adanya sentralisasi kebijakan ketua umum dalam melakukan rekrutmen politik. Memang ada kewenangan tersebut terkait pertimbangan-pertimbangan khusus yang mengacu pada kriteria. Adanya sentralisasi kebijakan ketua umum dalam melakukan rekrutmen politik. Memang awalnya Tim dari berbagai profesi ini yang menyeleksi bacaleg, tetapi jikapun ada kewenangan tersebut terkait pertimbangan-pertimbangan khusus yang mengacu pada kriteria.

Penjelasan terhadap internal partai dan salah satu calon anggota legislatif dari Partai Perindo, tidak terlihat bahwa adanya sentralisasi kebijakan ketua umum dalam melakukan rekrutmen politik. Namun pada kenyataannya, terlihat jelas terdapat peran otoritas pimpinan partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang direkrut. Terlihat jelas bahwa Partai Perindo dalam menjalankan proses penjurian

caleg, pimpinan Partai Perindo berhak menunjuk langsung siapa kader yang akan ditempatkan menjadi caleg. Terlepas pertimbangan apapun itu dalam menentukan caleg tersebut. Yang jelas pimpinan partai mempunyai hak untuk menentukan caleg yang akan diberikan amanah.

Civil service Reform

Pemilihan umum merupakan kesempatan pengurus partai politik yang dianggap mampu untuk mengambil keputusan terkait yang akan diusung menjadi calon legislatif. Untuk mempertahankan suatu jabatan, maka partai politik harus mampu menampilkan orang-orang yang memiliki kemampuan serta loyalitas yang sesuai dengan visi dan platform partai.

Melihat dari sistem demokrasi di Indonesia yang semakin hari semakin mapan, partai politik tentunya dituntut semakin dewasa. Tuntutan kedewasaan partai politik diuji seperti dalam merekrut orang-orang yang memiliki kemampuan baik direkrut secara internal maupun eksternal. Kemampuan dan keterampilan tersebutlah yang nantinya akan menjadi nilai jual bagi partai politik baik untuk mendapatkan suara dari masyarakat pada Pemilu nantinya.

Tipe kecenderungan *Civil Service Reform* merupakan proses rekrutmen dengan salah satu titik ukur berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi atau penting. Artinya untuk tipe *Civil Service Reform* ini menggabungkan dua tipe antara *tipe partisan* dan *tipe compartmentalization*, dimana tipe kecenderungan ini lebih menjurus kepada loyalitas dan kemampuan seorang calon anggota legislatif. Partai Perindo dapat memiliki kader yang kemampuan operasionalnya mumpuni terutama di bidang politik adalah hal yang diidamkan oleh partai politik untuk mewakili partai di DPRD.

Partai perindo secara khusus juga menggunakan kecenderungan *Civil Service Reform* dalam menetapkan calon legislatifnya, dimana lebih mengedepankan kemampuan dan

loyalitas, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Secara garis besar pola kecenderungan yang dimiliki Partai Perindo kabupaten Timor Tengah Utara dalam memilih dan menetapkan calon anggota legislatif, faktor yang paling dominan dalam melakukan perekrutan calon anggota legislatif adalah faktor loyalitas dan kemampuan, dimana seorang calon anggota legislatif itu pada umumnya mempunyai basis operasional yang mumpuni, sehingga diharapkan dapat menyelesaikan dengan cepat permasalahan-permasalahan yang ada dimasyarakat.

Metode yang digunakan dalam rekrutmen politik

Partai politik memiliki pola-pola tertentu dalam menentukan calon legislatif yang akan diusung. Pada pola-pola tersebut, biasanya terdapat metode dalam rekrutmen yang dilakukan. Hasibuan (2006) mengemukakan, cara rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik biasanya dikenal dengan dua metode yakni metode ilmiah dan metode non ilmiah. Teori yang dikemukakan oleh Hasibuan ini menekankan pada titik indikator ada tidaknya metodologi yang dijadikan oleh partai politik dalam melakukan rekrutmen politik. Pada hal ini peneliti melihat metode nya dari segi kriteria dan mekanisme yang digunakan Partai Politik Perindo kabupaten Timor Tengah Utara, yang didasarkan data dan fakta di lapangan.

Metode Ilmiah

Metode Ilmiah, yaitu rekrutmen yang dilakukan berdasarkan pada pedoman tertentu yang berisi tentang standar-standar tertentu. Berkaitan dengan metode rekrutmen, pastinya partai Perindo memiliki kriteria serta mekanisme yang digunakan, bagi calon legislatif yang akan diusung. Digunakan metode ilmiah, karena dalam pelaksanaan rekrutmen didasarkan standar-standar ilmiah dan perhitungan analisis yang matang, yang didasarkan oleh kriteria-kriteria yang diinginkan partai perindo.

Kriteria ini sebagai salah satu strategi Partai Perindo untuk mendapatkan caleg-caleg yang berkualitas, karena Partai Perindo menginginkan proses pemilihan calon anggota legislatif yang transparan dinilai kunci dari terwujudnya politik yang sehat, dan Partai Perindo ingin memulai sebuah tradisi politik yang baru. Bacaleg yang telah mendaftarkan diri diwajibkan mengetahui kriteria tersebut, agar para Bacaleg yang mendaftar mengetahui apa tujuan dari Partai Perindo sendiri.

Metode Non-Ilmiah

Metode Non-ilmiah, yaitu rekrutmen yang dilakukan dengan tidak mengacu standar-standar tertentu, melainkan didasarkan pada perkiraan saja. Partai Perindo Kabupaten Timor Tengah Utara dalam menyiapkan Bacaleg yang diusung tetap berdasarkan pada kriteria dan mekanisme atau pedoman ketentaun partai maupun ketentuan Undang-undang serta peraturan KPU yang berlaku.

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Pola Rekrutmen Calon Legislatif Partai Politik Perindo untuk Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Timor Tengah Utara maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Sifat pola rekrutmen calon legislatif yang dilaksanakan Partai Perindo menggunakan sifat pola rekrutmen tertutup jelang Pemilu 2019, dikarenakan dalam merekrut calon legislatif hanya dengan cara ditunjuk dan dihubungi langsung oleh partai untuk maju sebagai calon legislatif, tanpa mengadakan Pemilu raya internal (Pemira) terlebih dahulu dalam hal rekrutmen calon legislatif di internal partai; belum memenuhi kriteria serta standar dari rekrutmen terbuka.
2. Kecenderungan yang lebih dominan digunakan Partai Perindo dalam merekrut calon legislatif nya yaitu kecenderungan *civil service reform* yaitu loyalitas dan kemampuan, dimana untuk kecenderungan ini

menggabungkan dua tipe kecenderungan antara tipe *partisan* dan tipe *compartmentalization*.

3. Metode pola rekrutmen calon legislatif yang digunakan Perindo belum sepenuhnya menggunakan metode ilmiah karena dalam pelaksanaan rekrutmen yang dilakukan oleh partai didasarkan standar-standar ilmiah tetapi tidak melakukan perhitungan analisis yang matang.

S a r a n

Berdasarkan pada kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan maka peneliti memberikan beberapa saran partai Perindo kabupaten Timor Tengah Utara agar :

1. Dalam mempromosikan partainya dirasa kurang begitu luas dan maksimal, sebaiknya semaksimal mungkin menggunakan media sosial dengan cara yang efektif untuk mempromosikan partai, sehingga masyarakat dapat dengan cepat dan mudah mengetahui dan mengenal partai.
2. Metode rekrutmennya yang digunakan, sebaiknya Partai perindo sebagai partai baru menerapkan metode yang lebih revolusioner atau metode-metode yang lebih memberi warna baru yang berbasis ilmiah dan terukur, sehingga bisa terlihat perbedaan dengan partai-partai lain, bahwa partai baru ini mempunyai inovasi-inovasi yang baru dan bersifat ilmiah
3. Kecenderungan rekrutmen, seharusnya partai perindo sebagai partai baru menggunakan inovasi-inovasi yang baru juga sehingga membuat nilai lebih dimata masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

AD/ART Partai Perindo AD/ART

- Budiardjo Miriam. 1998. Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta. PT Gramedia.
----- . 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Cholisin. 2007. Dasar-dasar Ilmu Politik. Yogyakarta:UNY Press
- Dani, Karim. 2006. Sistem Politik dan Pemilu di Indonesia. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Efriza, 2012. Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik. Bandung. Alfabeta.
- Firmanzah. 2011. Mengelola Partai Politik. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Gaffar, Afan. 1999. Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haryanto. 1982. Sistem Politik. Suatu pengantar. Yogyakarta:Liberty
- Haris, Syamsuddin. 2005. Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Haryanto. 1982. Sistem Politik Suatu Pengantar. Liberty. Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2006. Manajemen, Dasar, Pengertian dan Masalah. Bumi Aksara. Jakarta
- Huntington P, Samuel 1995, Gelombang Demokratisasi Ketiga, Grafiti Press: Jakarta
- Moleong, Lexy J. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. 2012. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Pamungkas, Sigit. 2011. Partai Politik Teori Dan Praktik Di Indonesia. Yogyakarta: Institute For Democracy And Welfarism. Purhantara,
- Fadillah. 2003. Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Putra, Fadillah. 2007. Partai Politik dan Kebijakan Publik. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Rahman, Arifin. 2002. Sistem Politik Indonesia dalam Perspektif Struktural Fungsional, SIC. Surabaya,
- Romli, Lily. 2005. Pemilihan Presiden Langsung 2004 dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia. LIPI. Jakarta.
- Rizkiyansyah, F. K. 2007. Mengawali Pemilu Menatap Demokrasi. Bandung: IDEA Publishing.
- Sukarna, 1981. Sistim Politik, Bandung: Penerbit Alumni.
- Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Singarimbun, Masri.1995. Metode Penelititan Survei. LP3S, Jakarta
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Wahyu. 2010. Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis. Yogyakarta: Graha Ilmu Putra,